

ABSTRAK

Perubahan iklim menghadirkan tantangan signifikan bagi pengelolaan dan keberlanjutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu, dan terjadinya peristiwa cuaca ekstrem berpotensi memengaruhi kondisi ekosistem serta efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Situasi ini menuntut adanya strategi pemerintah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam merespons dan memitigasi dampak perubahan iklim.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis secara tematis menggunakan perangkat lunak NVivo 12.

Kerangka analisis penelitian ini didasarkan pada *Advocacy Coalition Framework* (ACF), yang mencakup enam dimensi utama: subsistem kebijakan, koalisi advokasi, sistem keyakinan, pembelajaran berorientasi kebijakan, guncangan eksternal dan internal, serta perubahan kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kebijakan pemerintah terkait dampak perubahan iklim di kawasan TNGGP dari perspektif ACF, dengan fokus khusus pada interaksi antar-pemangku kepentingan dan proses perubahan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanganan dampak perubahan iklim melibatkan pemerintah, pengelola kawasan konservasi, personel keamanan dan pengawasan hutan, serta masyarakat setempat. Interaksi di antara para aktor tersebut mendorong terbentuknya mekanisme koordinasi dan kolaborasi yang didasari oleh kepentingan bersama dalam pelestarian lingkungan. Pembelajaran kebijakan terjadi melalui pengalaman pelaksanaan, koordinasi antarpihak, dan evaluasi kebijakan. Sementara itu, perubahan kondisi lingkungan telah mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan yang adaptif, termasuk rehabilitasi hutan, pemantauan kawasan, dan peningkatan pelibatan masyarakat.

Kata kunci: perubahan iklim, strategi pemerintah, *Advocacy Coalition Framework*, dinamika kebijakan, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.